

TESIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN



Disusun oleh :

RAMLI MAHALI

NPM	: 105201447
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : RAMLI MAHALI
Nomor Mahasiswa : 105201447/PS/MIH
Konsentrasi : HTN
Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI
KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN

Nama Pembimbing

Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum.

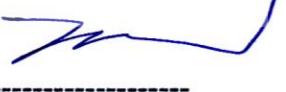
Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Tanggal

1/2 - '12

2/2 - '12

Tanda Tangan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : RAMLI MAHALI
Nomor Mahasiswa : 105201447/PS/MIH
Konsentrasi : HTN
Judul Tesis : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI
KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN

Nama Pengaji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum (Ketua)	17/2 - 2012	
Anny Retnowati, SH., M.Hum. (Pengaji I)	17/2 - 2012	
G. Aryadi, SH., M.H (Pengaji II)	17/2 - 2012	



B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan kepada :

- *Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan*
- *Bapak dan Ibuku tercinta yang telah bersusah payah mengasuh dan membantuku selama kuliah, sehingga saya bisa menjadi seperti ini*
- *Kakak-kakakku yang tidak henti-hentinya memberikan saran, kritik, dan dukungannya*
- *Cintaku (Suci Aryati) tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasinya*
- *Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu saya banggakan*
- *Teman-Teman Seperjuangan (BRI Kusumanegara Yogyakarta Katamso)*

MOTTO

- *Hiduplah seperti pesawat yang ketika akan terbang melawan arah angin bukan searah dengan arah angin (Hitam Putih)*
- *Apa yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan, akan tetapi apa yang terbaik buat Tuhan sudah tentu terbaik buat kita (Penulis)*
- *Jadilah orang yang berguna bagi keluargamu karena keluarga adalah segalanya (Penulis)*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ramli Mahali

NIM : 105201447

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

PTS : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Penelitian "**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKETERAN**".

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya. Tesis ini tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan studi Universitas atau Institut lain, kecuali bagian tertentu yang telah dipergunakan dalam teks dengan mengetahui tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut menjadi tanggungjawab saya.

Yogyakarta, Februari 2012

Yang menyatakan,

Ramli Mahali

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKETERAN”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis Menyadari sepenuhnya, terselesainya Tesis ini berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, M.Hum selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Bapak Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah begitu sabar dan bijaksana memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga terselesaikannya Tesis
5. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah begitu sabar dan bijaksana memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis sehingga terselesaikannya Tesis
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah begitu banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga kepada penulis
7. Ibu Dr. Sri Suwanti selaku Nara Sumber yang telah memberikan bantuan, sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik

8. Keluarga saya yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan kepada saya, sehingga saya dapat menulis Tesis ini
9. Teman-teman seperjuangan (Prodi Hukum 2010, Universitas Atma Jaya Yogyakarta) atas saran dan kritikannya
10. Cintaku Suci Aryati terima kasih atas nasehatnya sehingga saya bisa menyelesaikan Tesis ini
11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena dengan bantuan kalian semua, saya bisa menulis Tesis ini

Penulis Menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian ibarat pepatah yang mengatakan "tiada gading yang tak retak", maka mudah-mudahan Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	16
B. Aborsi.....	25
C. Etika Kedokteran.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Sumber Data.....	48
C. Metode Pengumpulan Data	49
D. Metode Pendekatan.....	49
E. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Aborsi dengan Alasan Perkosaan di Perbolehkan (Menurut Ketentuan UU Kesehatan.....	52
1. Alasan Yuridis Diperbolehkan Aborsi Menurut Ketentuan UU Kesehatan.....	52
2. Alasan Psikologi Diperbolehkan Aborsi Menurut Ketentuan UU Kesehatan.....	57
3. Alasan Medis Diperbolehkan Aborsi Menurut Ketentuan UU Kesehatan.....	61
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Aborsi karena Perkosaan.....	63
C. Harmonisasi Hukum Kesehatan dengan Etika Kedokteran dalam Kasus Aborsi Karena Perkosaan.....	68
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN

ABSTRAK

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat beberapa ketentuan tentang aborsi yaitu Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77. Permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat. Undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian. Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi karena perkosaan dilihat dari etika kedokteran menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *Criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *Strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actu reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana. Hasil dari penelitian adalah Aborsi dengan alasan perkosaan diperbolehkan menurut peraturan UU Kesehatan, hal tersebut dikarenakan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Pasal 75 terkandung makna bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pada intinya hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan.

Kata kunci : kebijakan, hukum pidana, aborsi, etika kedoteran

POLICY OF CRIMINAL LAW TO ABORTION BECAUSE RELATED RAPE OF DOCTOR ETHICS

ABSTRACT

In UU No. 36 year 2009 about Health of there are some rule of about abortion that is Section 75, Section 76 and Section 77. problems Abortion obtain get the legitimasi and coherent. By eksplisit, in this law there are section arranging to regarding the abortion, though medical to in practice contain various reaction and generate controversy in various society coat. Law prohibit the practic abortion, but in a state of certain there are exemption. Straightening of criminal law of related to abortion because rape seen from doctor ethics of according to Moeljatno, that analogous crime by Criminal act. He refuse emphatically to use the term of doing an injustice in the place of term of Strafbaar feit or delict. Tone with the opinion Moeljatno, Roeslan Saleh also say that that crime is analogous by criminal act, become to differ from the term of Strafbaar feit covering responsibility of crime answer. Criminal Act according to him mean the deportment and effect, inveterate referred by actureus. Crime (criminal act) have to be differentiated by crime answer. Result from research is abortion by the reason of rape enabled by according to regulation of UU Health, the mentioned [of] because of in UU No.36 Year 2009 about health in Section 75 consisted in by meaning that pregnancy effect of rape can cause the psychological trauma to rape victim. Its nucleu core is formal law arranging problem aborsi express that Indonesia government refuse the aborsi. Exemption given by if there is medical indication as contained in Medicare Legislation.

Keyword : criminal law policy, abortion, doctor ethics